

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam kepenulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang akan menjadi bahan perbandingan. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku-buku dan skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya mengenai teori yang relevan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan Evaluasi Kinerja BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yang menjadi dasar dalam memahami berbagai aspek yang telah diteliti serta metodologi yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dan kendala yang dihadapi oleh BUMDes di berbagai wilayah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Literature Review
1.	Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kabupaten Bintan	(Afrizal et al., 2024)	Keberhasilan BUMDes di Kabupaten Bintan tidak lepas dari inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh para pengurus BUMDes. Kemitraan dan kerjasama dengan pihak ketiga seperti pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah terbukti mampu memberikan dorongan terhadap pendapatan BUMDes melalui unit-unit usaha yang dikelolanya. Model kerjasama di beberapa sektor perdagangan, jasa, dan industri yang dibutuhkan oleh konsumen merupakan model yang harus terus dipertahankan demi keberlangsungan usaha BUMDes
2.	Pengembangan ekonomi dan	(Febrina et al., 2024)	Hasil penelitian ini mengaitkan tahapan dalam

	<p>lingkungan pedesaan: strategi pengembangan BUMDES</p>		<p>menjalankan unit usaha BUMDesa (Perencanaan BUM Desa, peninjauan, penataan dan pemilihan BUM Desa, pemeliharaan aset dan pelaporan hasil usaha) dengan prinsip pengelolaan Desa yang profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, mengutamakan sumber daya lokal dan berkelanjutan.</p> <p>Pengembangan BUMDesa belum optimal terlihat dari adanya permasalahan yaitu struktur organisasi BUMDesa serta tata kerja dan hubungan antar perangkat organisasi BUMDesa, kendala dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, serta pengelolaan dan pengembangan unit usaha berbasis teknologi. Pelaksanaan demokrasi deliberatif belum optimal dalam pengambilan kebijakan strategis terkait BUMDesa, serta dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan BUMDesa. Kegiatan ekonomi lokal dalam tata kelola BUMDes mendukung perekonomian rakyat. Kegiatan ekonomi rakyat penting dan terkait dengan pelestarian sumber daya alam dan pembangunan lingkungan. Hasil penelitian ini juga mengkaitkan tahapan dalam menjalankan unit usaha BUMDesa (Perencanaan BUM Desa,</p>
--	--	--	---

			Peninjauan, Penataan, dan Pemilihan BUM Desa, Pemeliharaan Aset, serta Pelaporan Hasil Usaha) dengan asas Pengelolaan Desa yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, partisipatif, mengutamakan sumber daya lokal dan berkelanjutan.
3.	Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Keberhasilan Usaha Masyarakat Pedesaan	(Yuesti et al., 2024)	Hasil dari penelitian ini meliputi Modal usaha memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha. Hasil ini memiliki arti bahwa semakin besar modal usaha, maka semakin besar pula keberhasilan usaha. Melalui Strategi pemasaran juga dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha. Hasil ini memiliki arti bahwa semakin baik strategi pemasaran, maka semakin besar pula keberhasilan usaha. Dapat diketahui bahwa Modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini berarti bahwa semakin besar modal usaha, maka semakin besar pula kesejahteraan masyarakat.
4.	Inovasi terbuka pada badan usaha milik desa: peran orientasi kewirausahaan dalam meningkatkan	(Wulandari & Wardani, 2024)	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung pembiasaan dalam kewirausahaan terhadap kinerja keuangan signifikan positif, tetapi kinerja sosial tidak

	kinerja finansial dan sosial		berpengaruh signifikan. Selain itu, juga menunjukkan bahwa inovasi terbuka berpengaruh terhadap kinerja sosial dan kinerja keuangan, tetapi pada kedua hasil, pengaruh kinerja sosial lebih dominan. Hasil tersebut menjelaskan pentingnya peran mediasi inovasi terbuka dalam pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja keuangan dan kinerja sosial BUMDes. Mediasi inovasi terbuka terhadap pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja keuangan adalah mediasi parsial. Sementara itu, mediasi inovasi terbuka, pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja sosial adalah mediasi penuh.
5.	Konsep Badan Hukum BUMDES Yang Sempurna Pasca UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Peran Peningkatan Pendapatan Desa	(Kamil et al., 2023)	Menurut pengertian BUMdes, tujuan BUMdes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung, di samping untuk meningkatkan PAD desa. Oleh karena itu, bentuk badan hukum BUMdes pasca cipta kerja harus diatur agar tujuan tersebut dapat tercapai. Pengaturan yang paling penting yang harus dilaksanakan bagi BUMdes adalah tidak boleh memiliki anak perusahaan yang berbentuk PT karena jika demikian, maka akan berlaku UU PT dan anak perusahaan Bumdes tersebut dapat

			<p>diprivatisasi. Sebagaimana yang dapat kita lihat dari UU BUMN dan BUMD, UU Cipta Kerja atau Peraturan Pelaksanaannya tidak mengatur Bumdes yang berbentuk Persero atau Perusahaan Umum. Oleh karena itu, jika tidak diatur, maka tujuan pengembangan Bumdes yang meliputi pembinaan masyarakat dan peningkatan PAD tidak akan tercapai.</p>
6.	<p>Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Desa Wisata Pembangunan</p>	<p>(Revida et al., 2023)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Terdapat kontribusi keterbukaan BUMDes terhadap pengembangan desa wisata. Terdapat kontribusi transparansi BUMDes terhadap pengembangan desa wisata. Terdapat kontribusi akuntabilitas BUMDes terhadap pengembangan desa wisata. Terdapat kontribusi kewajaran BUMDes terhadap pengembangan desa wisata. Terdapat kontribusi BUMDes mandiri terhadap pengembangan desa wisata. Temuan baru penelitian ini adalah tata kelola kewirausahaan, partisipasi dan modal sosial BUMDes terhadap pengembangan desa wisata. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya mengkaji 5 (lima) tata kelola BUMDes, yaitu keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, kewajaran,</p>

			<p>dan kemandirian. Oleh karena itu, di masa mendatang terbuka peluang untuk melakukan penelitian terhadap model-model tata kelola BUMDes yang lain seperti tata kelola kewirausahaan, partisipasi dan modal sosial Badan Usaha Milik Desa terhadap pengembangan desa wisata.</p>
7.	<p>Agen Perubahan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan: Langkah Terwujudnya Klaster UKM di Indonesia</p>	<p>(Alamanda et al., 2023)</p>	<p>Penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis berdasarkan eksplorasi peran Endik sebagai agen perubahan. Pertama, intensitas latihan dan kecepatan Endik dapat membantu mempercepat program. Saat ini, pelatihan tidak dapat dilakukan setiap hari untuk semua siswa. Mereka hanya dapat bergantian satu kali per minggu selama pelatihan. Hal ini karena program dilakukan secara mandiri sehingga keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah desa setempat dalam mengatasi kendala tersebut. Selain itu, Endik dapat meyakinkan BUMDes untuk menjadi agen pemerintah dalam menghasilkan produk desa yang unggul untuk mengatasi masalah keuangan. Kedua, program perubahan belum memiliki model bisnis. Agen perubahan sudah menjalankan program hingga</p>

		<p>menemukan investor dan berpikir untuk menjual produk secara teknis, tetapi model bisnisnya belum terbentuk. Masalah model bisnis menjadi masalah besar ketika transaksi mulai terjadi, sehingga sebelum transaksi terjadi, manajemen, khususnya pimpinan, harus menyelesaikan desain terlebih dahulu. Saran untuk masalah ini adalah Endik dan calon peserta pelatihan model bisnis, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup dalam merancang model bisnis.</p> <p>Ketiga, manajemen tidak terlaksana. Peran Endik sebagai agen perubahan adalah untuk menggenjot semangat warga desa dalam mencari pendapatan alternatif melalui kerajinan kayu, namun di sisi lain program perubahan tidak dikelola dengan baik. Endik tidak memiliki staf untuk membantu pekerjaannya. Meskipun masih terkendali dengan baik, kegiatan yang lebih besar dan padat akan menyebabkan beban kerja berlebih. Hal ini berimplikasi pada pemangku kepentingan terkait untuk turut serta dalam kegiatan Endik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut, termasuk mengadakan pelatihan manajemen sederhana bagi sebagian</p>
--	--	---

			warga desa atau santri agar mereka dapat mengelola balai pelatihan tersebut bersama-sama.
8.	Kinerja keuangan dan dampak dana desa terhadap pembangunan ekonomi pedesaan pascabencana di Pidie Jaya-Indonesia	(Iqbal et al., 2021)	Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Pembangunan tersebut diwujudkan melalui peningkatan infrastruktur publik desa, tata kelola pemerintahan desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang didukung oleh Dana Desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap Dana Desa sangat besar. Secara rata-rata, proporsi Dana Desa dalam APBDes (sisi pendapatan) sebesar 77-78%. Oleh karena itu peran Dana Desa sangat krusial dalam pelaksanaan program-program utama pembangunan desa. Namun demikian, BUMDes sebagai sarana kemandirian desa baru memperoleh porsi rata-rata 5% dari total Dana Desa selama tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Desa (PAD) juga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap sisi pendapatan dalam struktur APBDes.
9.	Menganalisis Kinerja BUMDES: Belajar dari Bank Sampah dan Unit Air Bersih	(Asis et al., 2020)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sangat jelas bahwa proses pendirian BUMDES telah memenuhi persyaratan

			<p>peraturan pemerintah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jenis usaha anggota BUMDES adalah unit simpan pinjam, unit usaha jasa, unit pengelolaan air bersih, unit penggemukan sapi, unit bank sampah, unit fotokopi, dan unit pemasaran hasil pertanian, dll. BUMDES di kabupaten tersebut telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian pedesaan. Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan bukti indikator kinerja pengelolaan BUMDES yang relatif baik. Secara tersirat pula bahwa BUMDES telah menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian desa yang telah mendorong penyerapan tenaga kerja desa di pedesaan.</p>
10.	Peran Modal Sosial terhadap Kinerja Ekonomi Usaha Pedesaan: Studi Kasus di Desa-desa Indonesia	(Aritenang, 2021)	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah berharap pendirian BUMDes menjadi motor penggerak percepatan kemandirian keuangan desa. Namun, berbeda dengan daerah perkotaan, masyarakat desa masih memiliki modal sosial lokal yang kuat yang dapat mengimbangi bagaimana kebijakan menentukan pengembangan BUMDes dan mendorong variasi kinerja antar desa. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan penting tentang peran</p>

			<p>modal sosial yang memengaruhi kinerja ekonomi BUMDes: pertama, pentingnya hubungan manajemen BUMDes dengan pemerintah desa dan masyarakat, dan kedua, kapasitas profesional manajemen BUMDes. BUMDes Sukanagalih lebih didorong oleh Manajemen BUMDes, sementara peran perangkat desa sebagai pengawas dan rendahnya keterlibatan organisasi masyarakat karena terbatasnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap BUMDes. Manajemen sepenuhnya mengendalikan pengembangan bisnis, termasuk pemasaran dan promosi kepada Administrator BUMDes.</p>
11.	<p>Strategi pembangunan pedesaan di Indonesia: Mengelola desa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan</p>	<p>(Tarlani & Sirajuddin, 2020)</p>	<p>Tata kelola pembangunan desa dan perdesaan merupakan suatu proses yang terus menerus ditingkatkan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian. Berbagai sumber pustaka menunjukkan bahwa isu dan permasalahan utama yang terjadi di lingkungan desa adalah kesiapan instansi pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat desa, rendahnya produktivitas sumber daya manusia, alih fungsi lahan pertanian, intensitas bencana,</p>

			<p>kurangnya modal untuk pembangunan ekonomi dan pemanfaatan tenaga kerja migran. Dengan menggunakan kerangka manajemen tersebut, makalah ini menyimpulkan bahwa setiap desa harus merumuskan solusi strategis sebagai berikut: perencanaan untuk meningkatkan akses informasi dan meningkatkan komunikasi publik; pengorganisasian untuk memperkuat sistem dan pengawasan internal; penggerakan untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa; dan pengendalian dan penguatan pengendalian spasial.</p>
12.	<p>Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Perekonomian di Desa Studi Kasus Pada Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.</p>	<p>(Firmansyah & Gamaputa, 2025)</p>	<p>Analisis kebutuhan dan pelaksanaan program, dan kebijakan atau hukum BUMDes Sri Rejeki dapat dikatakan masih belum dapat berjalan baik sebagaimana yang telah ditetapkan pada Buku Pedoman BUMDes Sri Rejeki. Hal ini dibuktikan melalui banyaknya program / unit usaha yang dimiliki BUMDes masih melenceng dari perencanaan sehingga masih belum mampu menghasilkan dan menginterpretasikan tujuan awal dari BUMDes Sri Rejeki kondisi juga diperkuat karena unit usaha yang dihasilkan oleh BUMDes kenyataannya tidak memberikan profit yang signifikan bagi desa.</p>

13.	Evaluasi Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mukarikaringan pada Desa Pangu 2 Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara	(NAUFAL, 2020)	Dalam proses pengelolaan BUMDes Mukarikaringan Desa Pangu 2 telah memenuhi 6 prinsip pengelolaan BUMDes. Baik pemerintah maupun pengurus telah bekerjasama dalam pengelolaan BUMDes Mukarikaringan yang dilihat dari pengembangan unit usaha yang dilakukan. Salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes adalah adanya kontribusi secara aktif dari semua pihak yakni pengurus sebagai pengatur dalam kegiatan usaha, pemerintah sebagai pengawas dan juga masyarakat sebagai pihak yang menggunakan jasa unit usaha tersebut. Semua pihak telah menjalankan peran masing-masing dengan baik sehingga BUMDes di Desa
14.	Penerapan Tata Kelola Dan Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Di Kabupaten Merangin	(Nurjanah et al., 2020)	Secara bersama-sama penerapan prinsip-prinsip tata kelola yaitu prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin. Dengan kata lain semakin baik penerapan tata kelola pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maka semakin baik pula kinerja keuangan

2.2 Dasar Teori

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan beberapa teori yang relevan dan akan menjadi landasan utama bagi pemahaman topik yang akan dibahas, beberapa teori tersebut adalah Evaluasi, Kinerja dan Ekonomi Lokal. Berikut penjelasan tiap teori tersebut:

1. Evaluasi Kinerja

Menurut (Simanjutak, 2005) evaluasi kinerja adalah proses sistematis yang dilakukan oleh atasan untuk menilai sejauh mana karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui hasil kerja, tetapi juga digunakan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan yang adil, menentukan kebutuhan pelatihan, membagi tanggung jawab yang tepat, dan menjadi acuan dalam keputusan promosi jabatan atau kebijakan lainnya. Lebih jauh, Simanjuntak menjelaskan bahwa tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk memastikan tercapainya target organisasi serta mendeteksi jika ada penyimpangan atau keterlambatan yang perlu segera ditindaklanjuti. Hasil BUMDes yang maksimal tentunya dipengaruhi oleh proses komunikasi yang terjadi baik internal BUMDes maupun dengan eksternal BUMDes seperti jajaran organisasi perangkat desa, (Aritenang, 2021). Evaluasi ini juga penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan karena hasil kerja mereka diakui dan dihargai. Secara keseluruhan, teori ini menekankan bahwa evaluasi kinerja adalah proses penting untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pencapaian tujuan organisasi secara adil dan berkelanjutan.

2. Kinerja

Kinerja memiliki arti hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dapat dipahami bahwa menjaga kinerja sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif antara pegawai, pemimpin, dan organisasi melalui pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja atas tujuan-tujuan terencana, (Stocks, 2022).

3. Ekonomi Desa

Menurut Suleman (2020), ekonomi desa merupakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan unsur ekonomi dan dapat dijadikan acuan dalam perubahan perekonomian suatu wilayah. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ekonomi desa adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi dan penanaman modal kepada masyarakat pedesaan yang telah ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Pemerintah telah sejak lama melakukan pengembangan ekonomi berbasis pedesaan melalui berbagai program dan metode untuk mencapai tujuan ini, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan. Unit usaha ini diberikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, (Riau & Riau, 2024). Perekonomian desa bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan keluarga, oleh karena itu perekonomian desa dimulai dari lingkungan rumah tangga dan meluas hingga kalangan terluas.

